

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDANAAN DAN KUALITAS APARATUR
TERHADAP**

KEBERHASILAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG

Oleh :Thoha Hasan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Amanah untuk menyelenggarakan beragam pendidikan yang diperlukan dalam mengisi kemerdekaan dan memerdekakan kehidupan berbangsa tersurat dalam alinea empat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu : “mencerdaskan kehidupan bangsa, serta pada Pasal 31 UUD 1945, bahwa : (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Pengertian “pengajaran” dalam Pasal 31 UUD 1945 identik dengan pengertian pendidikan yang dikenal sekarang. Istilah “pengajaran” di masa lalu juga melekat pada nama Departemen Pengajaran yang sekarang menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Sehingga tafsir hukum dari pasal ini adalah : ayat pertama menunjukkan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menghormati dan melindungi hak asasi individu yang berkedudukan sebagai warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Ayat dua menunjukkan bahwa pemerintah dalam alam kemerdekaan akan mewujudkan kewajiban melindungi hak asasi untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negaranya, dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Bersamaan dengan perkembangan pendidikan agama di sekolah umum, perhatian terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya terjadi sejak Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) di masa setelah kemerdekaan mengeluarkan maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945. Isinya menganjurkan, bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran agar pengajaran di langgar, surau, mesjid dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan. Berikut ini adalah tabel sekolah jenjang pendidikan agama Madrasah dalam tiap Kecamatan :

Tabel 1.1.

Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Tiap Kecamatan di
Kabupaten Karawang

Jenjang	Sekolah Unit	Guru		Murid		Kekurangan Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
M. Ibtidaiyah Negeri	2	106	1.005	454	18.925	275	689
M. Ibtidaiyah Swasta	121						
Total	123	1.111		19.379		964	

M. Tsanawiyah Negeri	5	218	977	2.690	13.683	131	146
M. Tsanawiyah Negeri	50						
Total	55	1.195		16.373		277	
Madrasah Aliyah Negeri	4	60	287	991	1.081	52	217
Madrasah Aliyah Swasta	12						
Total	16	347		2.072		269	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, 2007

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah guru pada madrasah ibtidaiyah yaitu 1.111 orang, jumlah murid pada madrasah ibtidaiyah yaitu 19.379 orang, jumlah guru pada madrasah tsanawiyah yaitu 1.195 orang, jumlah murid pada madrasah tsanawiyah yaitu 16.373 orang, sedangkan jumlah guru pada madrasah aliyah yaitu 347 orang dan jumlah murid pada madrasah aliyah yaitu 2.072 orang.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, posisi madrasah dalam peta pendidikan nasional semakin jelas, sebagai salah satu subsistem sistem pendidikan nasional. Integrasi ini secara umum berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan Islam jika dibandingkan dengan masa awal sejarahnya.

Kendala terpenting madrasah dalam pembelajaran adalah latar belakang sosial ekonomi orang tua/siswa yang umumnya rendah. Data menunjukkan bahwa 49,03% orang tua siswa madrasah berpenghasilan tidak tetap, 18,37% kurang dari Rp. 500.000, 17,49% antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, 10,22% antara Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 dan 4,89% lebih dari Rp. 2.000.000. Orang tua siswa umumnya pedagang kecil, petani, nelayan, buruh dan sopir, dengan latar belakang pendidikan yang juga rendah. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua siswa madrasah, tercatat 7,36% tidak sekolah, 42,58% lulusan SMP, 24,29% lulusan SLTA, 20,95% lulusan diploma dan 2,59% lulusan S-1.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan madrasah.
2. Masih adanya pelayanan yang diskriminatif dari pemerintah.
3. Kepekaan daerah Kabupaten Karawang masih rendah terhadap kebutuhankebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti program pendidikan yang tidak menjadi prioritas pelayanan untuk memperoleh pendidikan.
4. Partisipasi masyarakat dalam memberi masukan-masukan terhadap pelayanan pendidikan agama dasar dan madrasah masih sangat rendah, oleh karena masyarakat tidak merasakan langsung pendidikan tersebut, tetapi melalui anaknya yang bersekolah di madrasah. Rendahnya partisipasi masyarakat masyarakat juga meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di madrasah yang membawa dampak secara umum pada kualitas pendidikan nasional yang masih rendah.

5. Anggaran yang diberikan dalam pelayanan bidang pendidikan masih sangat rendah, sehingga seringkali mempersulit guru-guru untuk kenaikan pangkatnya, oleh karena harus berhubungan dengan Kementerian Agama di Pusat dan juga berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Jakarta.
6. Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah.
7. Kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan agama di Kabupaten Karawang, seperti kurangnya tenaga SDM yang memiliki kualifikasi S1 dan S2 dari perguruan tinggi negeri. Selain itu pelatihan yang diberikan kepada guru-guru khususnya yang menyangkut kompetensi masih sangat jarang dilaksanakan.
8. Peningkatan pelayanan pendidikan agama masih rendah dan belum mencerminkan hasil yang optimal, khususnya pendidikan dasar madrasah di Kabupaten Karawang, sehingga pemerintah perlu lebih komitmen dalam memperbaiki peningkatan pelayanan pendidikan agama.
9. Pengelolaan madrasah lebih mengandalkan pada dana yang bersumber dari masyarakat, dimana masyarakat memiliki kemampuan yang terbatas.
10. Pelayanan pendidikan belum memiliki standar kompetensi seperti kualitas guru dan kehendak masyarakat.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang ?
2. Seberapa besar pengaruh pendanaan terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang ?
3. Seberapa besar pengaruh kualitas aparatur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang ?
4. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur secara bersama-sama terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

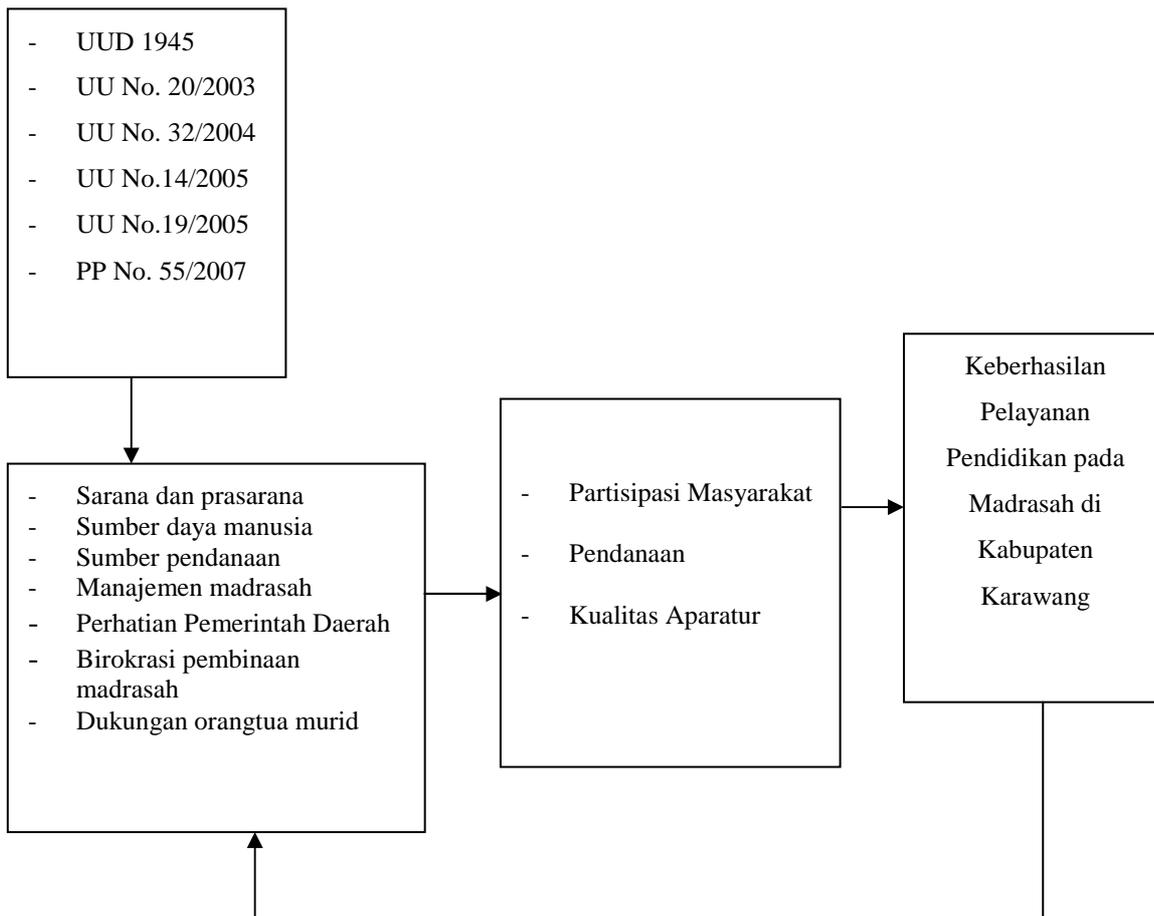
Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan akademik melalui kajian manajemen pemerintahan, di bidang studi ilmu pemerintahan dan khususnya yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan, serta

sekaligus dapat memberikan konsep mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendanaan terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang.
4. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur secara bersama-sama terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

1.8. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang dan besar pengaruh tersebut ditentukan oleh tahapan implementasi, tujuan partisipasi dan pendidikan berbasis masyarakat.
2. Terdapat pengaruh pendanaan terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang dan besarnya pengaruh tersebut ditentukan oleh pemeriksaan, sumber dan tujuan pokok.
3. Terdapat pengaruh kualitas aparatur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang dan besarnya pengaruh tersebut ditentukan oleh pengelolaan SDM, serta kompetensi.
4. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur dan secara bersama-sama terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang dan besarnya pengaruh tersebut ditentukan oleh tahapan implementasi, tujuan partisipasi, pendidikan berbasis masyarakat, pemeriksaan, sumber, tujuan

pokok, pengelolaan SDM, kompetensi, karakteristik pelayanan, tujuan penilaian kerja dan kualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pemerintahan

Ermaya (1998 : 10) mengemukakan pengertian Ilmu Pemerintahan, yakni :
“Suatu pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dimana pengetahuan didapat melalui suatu metodologi ilmiah dan berlaku secara universal”.

Koswara (2001 : 6) mengemukakan bahwa selain pemerintah ada yang dinamakan pemerintahan. Pemerintahan bisa diartikan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi bidang-bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan badan publik yang hanya meliputi bidang eksekutif saja.

2.2. Partisipasi Masyarakat

Demokrasi mengandung kata kunci partisipasi. Istilah partisipasi pada prinsipnya mempunyai makna dan konotasi yang sama dengan peranserta yaitu mengambil bagian atau peranan di dalamnya. Hanya saja bedanya adalah bahwa peranserta merupakan istilah yang berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *participation* karena itu *participation* atau peranserta dipandang sama dan dipergunakan secara bergantian. Sastropetro (1986 : 16) mengemukakan bahwa partisipasi, meliputi :

- a. Pikiran (*psychological participation*);
- b. Tenaga (*psysical participation*)
- c. Pikiran dan Tenaga (*Psychological and psysical participation*);
- d. Keahlian (*participation with skill*);
- e. Barang (*material participation*), dan
- f. Uang (*money participation*).

Jadi kesimpulan dari partisipasi masyarakat adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para pegawai yang melakukan persiapan, pelaksanaan, memonitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

2.3. Pendanaan

Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga

merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4. Kualitas Aparatur

Menurut Ndraha (1999 : 12), sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah “Sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kompetitif generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *Intelligence*, *Creativity* dan *Imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot dan sebagainya”.

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu meningkatkan daya serap teknologi secara menyeluruh diperlukan persiapan yang matang dengan sebanyak mungkin menjaring manusia yang mampu mengelola kehidupan secara produktif, efisiensi dan berkesadaran kebangsaan yang tinggi serta berwatak sosial yang serasi, selaras dan seimbang dalam bereksistensi terhadap lingkungannya.

2.5. Keberhasilan Pelayanan Pendidikan

Secara historis pendidikan agama tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pendidikan Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan “sekolah” pada abad ke-19. Sejak itulah terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan, dimana di satu sisi pendidikan agama terus berjalan dan di lain sisi sekolah yang dibangun pemerintah kolonial juga terus berjalan. Keduanya berjalan dalam kondisi yang sangat berbeda, baik dalam pemberian materi pembelajaran maupun segi performanya.

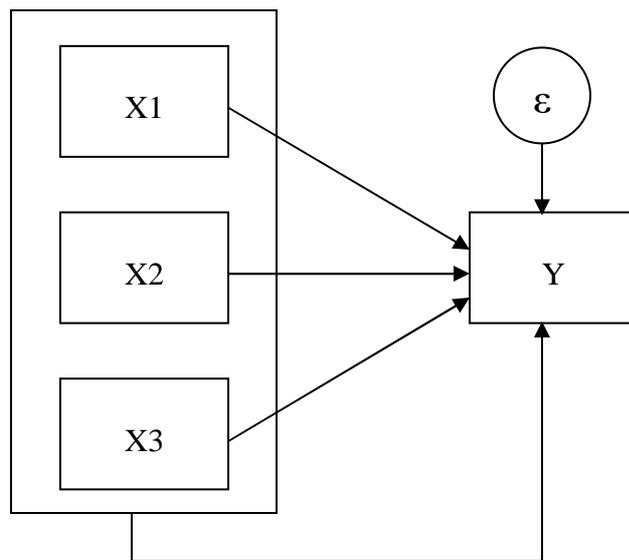
Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan selama ini mengkomodasikan tiga kepentingan. *Pertama*, kebijakan itu memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami. *Kedua*, kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah. *Ketiga*, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan (Malik Fadjar dalam Hasbullah, 2006).

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam rangka penyusunan disertasi, penulis menggunakan desain penelitian yang bersifat deskriptif analitik dengan pengambilan data di lakukan secara *stratified random sampling* dimana desain ini berusaha menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat mengenai fenomena terutama untuk keperluan studi selanjutnya dan untuk menguji hipotesisnya serta untuk melihat dinamika regresi antara variabel independent terhadap variabel dependent.

3.2. Model Penelitian



Gambar 3.1. Model Penelitian

Keterangan :

X1 = Partisipasi Masyarakat

X2 = Pendanaan

X3 = Kualitas Aparatur

Y = Pelayanan Pendidikan Madrasah ϵ = Epsilon, faktor-faktor diluar X₁, X₂ dan X₃ yang berpengaruh terhadap Y, akan tetapi tidak diteliti.

3.3. Populasi dan Sempel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2001 : 57), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini ditentukan populasi sebanyak 1.327 orang.

3.3.2. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *proportionate stratified random sampling*, yakni pengambilan sampel dengan cara acak, dimana setiap subyek populasi dipandang sama. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 800.

3.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bentuk regresi linear berganda dengan bantuan komputer program SPSS Versi 13.0 for windows. Dalam penelitian ini digunakan rumus regresi sederhana untuk menentukan hubungan masing-masing variabel X terhadap Y, selanjutnya menggunakan rumus regresi berganda untuk menentukan kontribusi X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama terhadap variabel Y.

Untuk lebih jelasnya, urutan masing-masing pengujian dapat diuraikan seperti dibawah ini :

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Analisis Determinasi
5. Uji Hipotesis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Reliabilitas dan Validitas

a. Uji Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach)
1.	Partisipasi Masyarakat (X_1)	0,732
2.	Pendanaan (X_2)	0,711
3.	Kualitas Aparatur (X_3)	0,740
4.	Keberhasilan Pelayanan Pendidikan (Y)	0,744

b. Uji Reliabilitas

Diperoleh koefisien korelasi butir (r -hitung) untuk 15 butir instrumen (kuesioner) dengan sampel sebanyak 800 orang ($n = 800$ orang), dengan $\alpha = 0,05$ didapat r_{tabel} 0,07, artinya bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir instrumen tersebut tidak valid dan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir instrumen tersebut dapat digunakan (valid).

4.2. Uji Hipotesis

a) Hasil Uji F

Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai Sig. 000 ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang, dan hipotesis terbukti.

b) Hasil Uji t

Untuk pengaruh partisipasi masyarakat secara individual terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan diperoleh nilai Sig. 000 ($\alpha 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara individual berpengaruh nyata terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang, dan hipotesis terbukti.

Untuk pengaruh pendanaan secara individual terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan, diperoleh nilai Sig. 000 ($\alpha 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan secara individual berpengaruh nyata terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang, dan hipotesis terbukti.

Untuk pengaruh kualitas aparatur secara individual terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan diperoleh nilai Sig. 000 ($\alpha 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur secara individual berpengaruh nyata terhadap peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang, dan hipotesis terbukti.

c) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk keperluan pengujian Koefisien Determinasi (R^2) ini, pengolahan data hasil penelitian menggunakan komputer dengan program SPSS versi 13.0. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R^2 sebesar 0,885. Artinya bahwa sebesar 88,5% keragaman keberhasilan pelayanan pendidikan disebabkan oleh keragaman partisipasi masyarakat pendanaan, dan kualitas aparatur sedangkan sisanya 11,5% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

d) Persamaan Regresi Berganda

Dari hasil pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \\ &= 3,191 + 0,065X_1 + 0,025X_2 + 0,150X_3\end{aligned}$$

e) Hasil Uji Sensitivitas (Beta Coefficient)

Tabel 4.1
Rekapitulasi Nilai Beta Coefficient

No.	Variabel	Beta Coefficient
1.	Partisipasi Masyarakat (X_1) terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan agama (Y)	0,061
2.	Pendanaan (X_2) terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan agama (Y)	0,057
3.	Kualitas Aparatur (X_3) terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan agama (Y)	0,138

Sumber : SPSS Versi 13.0

Rekapitulasi nilai beta coefficient yang terbagi menjadi faktor utama, faktor pendukung, serta faktor penguat. Yang menjadi faktor utama adalah Kualitas Aparatur (X_1), faktor pendukung adalah Partisipasi Masyarakat (X_3), dan yang menjadi faktor penguat adalah Pendanaan (X_2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh positif (79,2%) dan signifikan dari partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mendorong orang untuk menyumbang atau mendukung (*to contribute*) terhadap situasi tertentu, sehingga berbeda dengan kesukarelaan, dan selain itu juga mendorong orang untuk ikut bertanggungjawab didalam suatu kegiatan. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh kemampuan sosialisasi dan aparat yang didukung oleh kecukupan dana.
2. Terdapat pengaruh positif (98,2%) dan signifikan pendanaan terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang. Dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, serta dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan disamping partisipasi masyarakat yang didukung oleh aparat yang berkualitas.
3. Terdapat pengaruh positif (65,9%) dan signifikan dari kualitas aparatur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang, tentunya yang didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan pendanaan yang memadai. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu meningkatkan daya serap teknologi secara menyeluruh diperlukan persiapan yang matang dengan sebanyak mungkin menjaring manusia yang mampu

mengelola kehidupan secara produktif, efisien dan berkesadaran kebangsaan yang tinggi, serta berwatak sosial yang serasi, selaras dan seimbang dalam bereksistensi terhadap lingkungannya.

4. Terdapat pengaruh positif (88,5%) dan signifikan partisipasi masyarakat, pendanaan dan kualitas aparatur secara bersama-sama terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang. Yang menjadi faktor utama adalah kualitas aparatur, faktor pendukung adalah partisipasi masyarakat, dan yang menjadi faktor penguat adalah pendanaan.

5.2. Saran

1. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam bentuk penggalangan dana hendaknya berlangsung secara sistematis dan dinamis, berlangsung mulai dari perantara pengambilan keputusan, kemudian dilanjutkan dengan perantara pelaksanaan pelayanan pendidikan dan seterusnya perantara pemanfaatan hasil pendidikan, pada akhirnya perantara dalam penilaian pelayanan pendidikan dan hasilnya, dengan demikian perantara tersebut akan menjadi dinamis dan berkesinambungan.
2. Masalah penyaluran dan penggunaan dana untuk pendidikan di madrasah agar tercapai dengan optimal, maka diperlukan adanya pemantauan orang tua, serta sekolah dengan dinas. Berkaitan dengan masalah pendanaan pendidikan, mestinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menanggung biaya pendidikan pada lembaga dan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendanaan pendidikan yang mesti ditanggung pemerintah mencakup biaya operasional, biaya investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.
3. Untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas tinggi dan mampu meningkatkan daya serap teknologi secara menyeluruh dan peningkatan pelayanan diperlukan persiapan yang matang, yaitu melalui pelatihan, magang, kegiatan sertifikasi dan lain-lain. Siswa-siswa memerlukan guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan yang bersedia berkomunikasi penuh waktu, tidak dibatasi jam formal pembelajaran yang sangat singkat. Itu berarti madrasah harus mengembangkan *after school programs*, *full days school*, bahkan *boarding school* atau sekolah berasrama agar madrasah dapat mengembangkan kegiatan seperti remedial, tutorial, pendalaman, pengayaan atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan minat, bakat dan keagamaan.
4. Keberhasilan pendidikan Islam akan membantu keberhasilan pendidikan nasional. Begitu juga sebaliknya, keberhasilan pendidikan nasional secara makro turut membantu pencapaian tujuan pendidikan Islam. Pada otonomi pendidikan dewasa ini sebaiknya perbedaan perlakuan tidak perlu lagi terjadi. Madrasah adalah milik bersama yang perlu memperoleh perhatian bersama. Kehadiran madrasah hendaknya dianggap sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Nasional yang pengelolaannya pun dilakukan sebagai bagian dari tugas-tugas otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Hasbullah, 2006, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada.

Koswara, E., 2001, *Teori Pemerintahan Daerah*, Institusi Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta.

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Sastropoetra, 1986, *Partisipasi*, Mc Graw-Hill Book Company.

Suradinata, E., 1998, *Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Ramadhan.

Taliziduhu, Ndraha, 1999, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

DOKUMEN

Inovasi, Jurnal Seri Mutu Madrasah dan Pondok Pesantren, Volume 1 Jilid 3, Oktober – Nopember 2005, Madrasah Development Center (MDC) Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.